

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka dalam bab IV ini akan disampaikan kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini. Kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bidang pendidikan termasuk di dalam urusan pemerintahan yang konkuren. Dalam hal ini, bidang pendidikan termasuk ke dalam salah satu urusan pemerintahan yang wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Kabupaten Merauke masuk dalam Provinsi Papua, dalam hal ini Provinsi Papua diberikan otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2021. Khusus Provinsi Papua kewenangan pendidikan diatur dalam PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, terdapat pembagian kewenangan dalam bidang pendidikan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan

pendidikan dan bahasa dan sastra. Dalam penulisan ini membahas sub urusan manajemen pendidikan, penyelenggara pendidikan di Kabupaten Merauke belum berjalan dengan baik, masih ada beberapa kendala yang masih diupayakan untuk diselesaikan seperti kekosongan guru, belum adanya pemberian beasiswa khusus OAP, dan kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai .

2. Faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan adalah keterbatasan sarana prasarana seperti fasilitas, peralatan sekolah dan infrastruktur yang memadai. Di Kabupaten Merauke infrastruktur sekolah sudah dibangun hingga ke pelosok daerah dan dibantu oleh beberapa lembaga keagamaan untuk mengelola sekolah namun fasilitas yang didapatkan masih minim sehingga pembelajaran dan pengajaran tidak berjalan dengan baik. Kabupaten Merauke masih memiliki masalah yang sama dari tahun ke tahun terkait guru yang meninggalkan tempat tugas. Adanya pengalihan kewenangan yang menyebabkan pengaruh terhadap penyelenggara dan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Merauke. Dengan adanya pembagian kewenangan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik akan tetapi penyelenggara pendidikan di Kabupaten Merauke masih jauh dari harapan, belum diselenggarakan secara menyeluruh sesuai peraturan perundang-undangan. Manajemen keuangan khususnya dana otonomi khusus yang belum dikelola dengan baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, hal ini akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua.

B. Saran

1. Penguatan Infrastruktur Pendidikan, perlu dilakukan investasi dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan di Kabupaten Merauke, termasuk gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga. Infrastruktur yang memadai akan membantu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan memfasilitasi pengembangan potensi siswa.
2. Penetapan Kurikulum Lokal, adanya kurikulum lokal sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat identitas budaya, Bahasa, sejarah atau kekayaan lokal suatu daerah. Kurikulum lokal dapat dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan spesifik daerah setempat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dan sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat setempat
3. Mengisi Kekosongan Guru, dengan mengisi kekosongan guru, lembaga Pendidikan dapat memastikan adanya tenaga pengajar yang memadai untuk melaksanakan proses pembelajaran. Guru yang memiliki peran kunci dalam memberikan pengajaran yang efektif, mendukung perkembangan siswa, dan mendorong pencapaian hasil belajar optimal.
4. Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan, Upaya perlu dilakukan untuk memastikan aksesibilitas pendidikan yang merata di seluruh Kabupaten Merauke. Ini dapat mencakup pendirian sekolah di daerah terpencil, penyediaan transportasi siswa, dan pengurangan kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Program beasiswa atau bantuan pendidikan juga dapat membantu siswa yang kurang mampu secara finansial.